



Jalan Berliku Menuju Polisi Demokratis

foto: www.fotokita.com

Seiring bergulirnya reformasi, mau tak mau institusi Polri pun turut berubah. Berbekal dengan TAP MPR No VI dan VII tentang Pemisahan TNI dan POLRI dan UU No 2 Tahun 2002, ada desakan kuat agar Polri menanggalkan kultur militer yang melekat pada dirinya, yakni menjadi lembaga berkultur sipil dan pro rakyat dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga penegak hukum di negeri ini. Atas desakan berbagai kalangan serta keinginan internal Polri sendiri, maka dengan keluarnya Skep Kapolri No. 737/2005 tentang gerakan Perpolisian Masyarakat (Polmas), institusi Polri berupaya merubah paradigmanya. Namun ternyata tidak mudah untuk mewujudkannya. Potret buram masa lalu dan soal citra di masyarakat jadi beban tersendiri. Apakah Polmas bisa menjawabnya?

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang terlahir pada 1 Juli 2008 lalu, kini telah genap berusia 62 tahun. Usia yang sangat dewasa, untuk ukuran usia manusia. Namun banyak kalangan memandang kematangan usia tersebut masih belum berbanding lurus dengan kematangan dalam profesionalitas kerja sebagai salah satu lembaga penegak hukum. Ini terbukti dengan masih banyaknya keluhan terhadap kinerja Polri, tanpa menafikan sejumlah keberhasilan Polri dalam penanganan kasus terorisme, pembalakan hutan, dan kasus-kasus lainnya.

Soal citra, bagaimanapun Polri masih belum benar-benar lepas dari citra buruk terkait dengan sepak terjangnya di masa lalu. Ditambah lagi peristiwa beberapa tahun terakhir, di mana sejumlah oknum anggota polisi menembak mati orang-orang dekatnya, rekan seprofesinya, dan lainnya. Selain ini menandakan lemahnya pengawasan dalam penggunaan senjata yang menggambarkan trend mengawatirkan. Kasus di Polres Jombang dengan pelaku Iptu Sugeng Triono (April 2005), kasus Briptu Hance di Polres Jombang (Maret 2007)

bisa disebutkan sebagai contoh.

Dari data yang dihimpun *Indonesia Police Watch*, sejak tahun 2005 ada tujuh kasus anggota kepolisian yang menembak mati orang-orang dekatnya. Mulai dari istri, mantan pacar, mertua, teman, atau atasannya sendiri. Sebagian besar korban penembakan lebih dari satu orang. Bahkan, dalam kasus penembakan oleh anggota Polres Bangkalan, Jawa Timur, Brigadir Satu Rifai pada 8 Maret 2007, ada empat orang yang menjadi korban. Ada persoalan walau masih kasuistis, pada pola pengawasan personel Polri itu sendiri, terutama pada aspek

psikologis.

Selain contoh di atas, dalam penanganan beberapa unjuk rasa, yang berujung pada bentrok fisik, Polri cenderung disalahkan dan disudutkan. Sebut saja misalnya peristiwa bentrok dengan mahasiswa Universitas Nasional, awal Juli 2008 saat berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Belum lagi sketsa klasik polisi, soal suap-menyuap di jalan, pungli, kekerasan dalam penyidikan, salah tangkap dan sebagainya. Semua itu sekadar potret sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Polri.

Memang tugas dan peran yang diemban Polri tidaklah ringan. Sebagai petugas hukum, polisi selain menghadapi tuntutan profesionalisme yang semakin menguat, juga berhadapan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Tuntutan profesionalisme ini terkait modus operandi kejahatan yang senantiasa berkembang. Sedangkan tantangan dinamika sosial juga menuntut Polri untuk terus berbenah diri. Dalam hal inilah kemudian dalam menjalankan tugas-tugasnya Polri juga merasa perlu berbagi dan melibatkan masyarakat. Gagasan perpolisian masyarakat pun mendapatkan momentum dan relevansinya.

Dari pengalaman di berbagai negara, konsep *Civilian Oriented Policing (COP)* atau *Pepolisian Masyarakat (Polmas)* ternyata mampu menumbuhkan hubungan kerjasama antara polisi dengan warganya. Hubungan tersebut dapat menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan warga dalam membantu polisi mengidentifikasi, menanggulangi dan menyelesaikan sendiri masalahnya melalui keputusan dari warga itu sendiri.

Sebagai contoh misalnya, dengan menerapkan konsep *Polmas*, Polri di Kalimantan Barat (Kalbar),



foto: www.kompas.com

seperti yang diberitakan harian *KOMPAS* Edisi 3/08/07, tahun 2007. Polisi di Kalbar semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Salah satu indikator yang dapat dirasakan adalah dengan banyaknya pengaduan, dari perkara-perkara kecil sampai perkara besar. Bayangkan saja, suami-isteri yang rumah tangganya ribut lapor polisi, anak hilang lapor polisi, pencabulan, pemerkosaan, penipuan bahkan menanyakan alamat rumah saja ke kantor polisi. Belum lagi soal lain yang ditangani seperti narkoba, minuman keras, *illegal logging*, kejahatan perbankan, korupsi dan lain-lain. Indikator lainnya, citra yang lama terpatri seperti ungkapan '*lapor kambing hilang, harus jual sapi*' juga secara perlahan terkikis. Peningkatan profesionalisme di jajaran Polda Kalbar mulai terasa saat gencarnya perubahan imej dari *Bad Cop* ke *Good Cop*.

Keberhasilan COP di Yogyakarta

Realitas serupa juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hal itu diungkapkan Eko Prasetyo, salah satu pengurus Pusat Studi HAM (PUSHAM) UII Yogyakarta. Eko mengungkapkan, kerjasama antara masyarakat dan Polisi di

Yogyakarta telah memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kriminalitas, terutama di Jalan Malioboro hingga mencapai 30 persen. "Ini dalam hal deteksi dan pencegahan kejahatan. Dalam konteks ini, program *Polmas* di Yogyakarta memang benar-benar mengedepankan partisipasi masyarakat dan menempatkan polisi hanya sebagai fasilitator," ungkap Eko dalam "*Seminar Publik COP*" yang diselenggarakan Fahmina *Institute* pada (16/6/08) lalu, di Hotel Bentani Kota Cirebon.

Eko juga menegaskan, hal tersebut menunjukkan FKPM di Malioboro cukup berhasil. Bukan saja aktif melakukan berbagai kegiatan dan penanganan masalah-masalah sosial, tetapi juga memiliki tempat khusus di mata masyarakat. "Sehingga kadang para pengurusnya dapat nonton gratis, ini luar biasa," lanjut Eko menambahkan. Lebih jauh penulis buku "*Orang Miskin Dilarang Sekolah*" ini menegaskan, letak keberhasilan FKPM di Malioboro adalah karena besarnya partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah, dalam hal ini pihak Keraton Yogyakarta Sri Sultan sekaligus Gubernur DIY.

Realitas Polmas di Wilayah III Cirebon

Berbeda dengan Polmas di Kalbar dan Yogyakarta, Polmas di Cirebon nampaknya baru sekadar ada belaka, tetapi kerja-kerjanya belum berjalan efektif. Ini terungkap setelah dilakukan penelitian dengan metode Focus Discussion Group (FGD) di lima titik desa di wilayah III Cirebon yang dilakukan oleh Fahmina *Institute* tentang “*Polmas: Membangun Kerjasama Polisi dan Masyarakat Untuk Cegah dan Tangani Tarfiking*”. Menurut Iklillah Muzayyanah, salah satu tim peneliti dari Fahmina *Institute*, program Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) memang sudah ada di setiap Polsek di wilayah kabupaten Cirebon. Sayangnya, kinerjanya masih belum berjalan efektif.

“Ini karena berbagai hal, seperti lemahnya komitmen pengurus FKPM dan petugas Polmas, kurang adanya kepekaan sosial, lemahnya SDM dan tidak adanya strategi untuk menjaga keberlangsungan, serta persoalan pendanaan,” papar Iklillah. Selain kendala-kendala eksternal tersebut, lanjut Iklillah, citra polisi di masyarakat yang masih cenderung ‘miring’. Kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat, juga menjadi kendala utama ketidakefektifan FKPM di Kabupaten Cirebon seperti Majalengka, Indramayu, Gebang, Kuningan dan beberapa daerah Kabupaten Cirebon lainnya.

Minimnya Sarana dan Prasarana

Realitas terkait kondisi Polmas serta sejumlah kendala tersebut, juga diakui sejumlah Kepala Bagian (Kabag) Bina Mitra dan petugas Polmas. Kabag Bina Mitra Polres Kabupaten Cirebon, Kumpul R. Fahrudin M misalnya, mengaku persoalan anggaran bukanlah kendala utama dalam kerja-kerja Polmas. “Karena selama ini kita kesulitan di masalah sarana dan prasarana. Terutama untuk mobilitas, seperti

sekarang kita belum punya mobil khusus untuk ke lapangan. Padahal ranah kerja kita sangat luas,” ungkap Fahrudin ketika ditemui *Blakasuta* di ruang kerjanya, pada Selasa (12/8/08) lalu. Dia juga berharap anggaran Polmas dimasukkan dalam APBD.

Terlepas dari berbagai kendala yang muncul, Fahrudin mengaku begitu banyak mendapat dampak positif dari Polmas. Seperti partisipasi masyarakat dalam tugas-tugas kepolisian. “Secara pribadi dan organisasi, saya bisa merasakan dampak dari Polmas. Kemajuan dari pelayanan polisi ini sudah banyak yang dilakukan. Tapi tetap butuh pendapat dan penilaian dari masyarakat,” ungkap dia.

Sebetulnya, lanjut Fahrudin, Polmas mengajak masyarakat untuk berfikir dan bertindak seperti polisi. Masyarakat juga sebenarnya bisa mensosialisasikan Polmas, sehingga tindakan masyarakat ini muncul dari hati nurani sendiri. “Karena pada dasarnya organisasi Polmas di masyarakat itu sudah terbentuk sendiri. Sebelum munculnya Polmas, sebenarnya masyarakat sudah memiliki *ruh* Polmas. Seperti di Cirebon, pernah ada Paguyuban Masyarakat Cirebon,” ujarnya menambahkan.

Selama ini Bina Mitra Polres Kabupaten Cirebon telah memberikan penyuluhan-penyuluhan. Seperti kepada para tukang *ojek* agar jangan memilih Golput, serta memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba. Selain itu juga memberikan selebaran, serta sejumlah aksi lainnya. “Kita juga mengadakan dialog interaktif di radio. Jadi dari situ kita benar-benar nyata mengetahui keluhan dan keinginan warga. Mereka bebas, mau tanya apa saja, saya selalu menjawab dengan senyum,” jelas Fahrudin.

Fahrudin juga mengakui, selama ini citra polisi di masyarakat masih ‘miring’, banyak masyarakat yang masih merasa takut untuk bekerjasama dengan polisi. Menurut

dia, hal itu tidak terlepas dari masalah internal di kalangan polisi sendiri. “Dalam hal ini, kami harus bekerja keras merubah imej itu. Setelah reformasi kepolisian, kami benar-benar menekankan kepada seluruh polisi agar mau menyapa, dengan tetap ramah. Jadi semua itu ada tatakramanya, seperti senyum sapa dan salam.”

Mengubah kultur, butuh waktu lama

Tidak jauh berbeda dengan Bina Mitra Polres Cirebon, hal senada juga diungkapkan Kabag Bina Mitra Polres Indramayu, Kumpul Suhiro SH, kendati mengakui belum maksimal, tetapi Bina Mitra di bawah pimpinan beliau menjelaskan selain memberikan penyuluhan, pelatihan, pembinaan di sekolah-sekolah, serta mendatangi rumah warga secara *door to door*, Bina Mitra Polres Indramayu juga telah membentuk 22 FKPM. Baginya, perubahan terkait kultur polisi, sikap-sikap dan karakter polisi yang dicitrakan buruk, memerlukan proses dan waktu cukup lama.

“Yang pasti, perubahan ini diharapkan mampu mengikis habis pandangan terhadap Polri. Kita juga harus konsentrasi pada pembinaan terhadap Polri. Pembinaan terhadap masyarakat, seperti Siskamling, pengawasan terhadap jasa keamanan. Karena sebelumnya, Polmas identik dengan Siskamling,” ungkap Suhiro ketika ditemui *Blakasuta* di ruang kerjanya, pada Kamis (14/8/08) lalu.

Jadi, lanjut dia, Babinkamtibmas akan selalu ada dan berbaur dengan masyarakat untuk menanggulangi gejolak sosial. “Selama ini kami tidak meminta ataupun menuntut apapun pada masyarakat. Kami hanya menerima, baik informasi, masukan, maupun keluhan dari masyarakat,” papar dia perlahan.

Dengan adanya Polmas, Suhiro berharap pernyataan ‘miring’ tentang polisi semakin hilang. “Kami juga berharap, semakin banyak lagi masyarakat yang mau terbuka dan

mau bekerjasama dengan polisi," tandas Suhiro.

Dari Door to door hingga menjadi guru TK

Biasanya FKPM dibentuk khusus untuk daerah-daerah tertentu yang rawan pencurian, serta yang dianggap tingkat kasus kriminalitasnya cukup tinggi. Bina Mitra bermitra dengan masyarakat baik dengan kelompok agama maupun lembaga pendidikan. Bina Mitra Indramayu juga memprioritaskan penyuluhan hingga ke *home industries*. Diakui Suhiro, dampak Polmas benar-benar terlihat dalam pelayanan yang cukup ekstra kepada masyarakat. "Kami juga membuka layanan *call center*, dan selama ini sudah berjalan efektif. Hampir setiap hari kami mendapat laporan-laporan dari warga, karena setiap hari kami selalu mendatangi warga, baik yang sedang *ngumpul-ngumpul*, maupun yang di rumah-rumah" ujar dia.

Selain persoalan sarana dan prasarana yang menjadi kendala dalam kinerja Bina Mitra, persoalan kemampuan personil untuk mengkomunikasikan kepada warga juga masih kurang. Seperti halnya kemampuan memberikan penyuluhan lewat acara seminar maupun pelatihan di depan audiens. "Kalau

dalam hal anggaran, itu tidak terlalu menjadi kendala. Namun kami lebih banyak bersilat *urrahmi* ke rumah-rumah warga. Karena dari situ kami mendapat informasi baik tentang trafiking, KDRT, maupun pencurian," tandas Suhiro mengakhiri.

Sementara itu petugas Polmas Posek Babakan Gebang Kab. Cirebon, Bripta Guruh Mulia Indarto, mengaku baru tahap pembentukan FKPM, sehingga belum memperlihatkan hasil kerjanya. "Namun beberapa tahun terakhir ini, kami melakukan program khusus untuk lebih dekat dengan masyarakat, yaitu Polisi Sahabat Anak (PSA)," ungkap Guruh ketika ditemui *Blakasuta* dalam acara pelatihan Polmas "Pelatihan Perpolisian Masyarakat (Polmas): Membangun Kemitraan Polisi dan Masyarakat" yang diadakan oleh Fahmina *Institute*, di Hotel Sunyaragi, Senin-Rabu (25-27/8/08) lalu.

Program Polisi Sahabat Anak (PSA) adalah salah satu program untuk mengubah citra buruk polisi di masyarakat. Dalam program tersebut, anggota Bina Mitra Kapolsek Gebang dituntut untuk mengajar layaknya seorang guru taman kanak-kanak (TK). "Jadi kami mengajar di TK yang ada di Kecamatan Gebang setiap dua minggu sekali, pada hari Rabu," ujar

dia. Dengan program PSA tersebut, Guruh mengaku masyarakat terutama anak-anak mulai mau menyapa dan berkomunikasi lebih akrab dengan polisi. "Sedikit demi sedikit kita akan berubah, agar Polisi itu jangan ditakuti," jelas Guruh menambahkan. Kini, Guruh mengaku tidak hanya disapa dengan "Pak Polisi", tapi juga disapa dengan sapaan "Pak Guru".

Baginya, pada dasarnya Polisi sudah akrab dengan masyarakat. "Tapi masyarakat masih takut. Dengan adanya Polmas, ini akan semakin membantu. Saya punya 13 desa. Kekuatan personil kurang lebih 20 orang. Di 19 desa tersebut, Babinkamtibmas (sekarang petugas Polmas) ada 9 orang. Kita juga ada SK dan tunjangannya, perbulan Rp. 100.000," paparnya. Sedangkan realitasnya, kata Guruh, anggota Babin kerjanya lebih sering merangkap, anggota Serse. Sehingga kerja mereka juga tidak lancar.

Guruh meminta saran sebanyak-banyaknya pada warga, agar bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Karena, sampai sekarang gerakan Polmas di Gebang sendiri belum ke kampung-kampung secara menyeluruh. Pelaksanaan juga belum berjalan lancar. Sumber daya di FKPM itu belum mampu dan menunjang. Termasuk bagaimana caranya menyelesaikan masalah dan menghadapinya. Maka menurutnya, pelatihan tentang fungsi FKPM juga perlu banyak di lakukan di kalangan masyarakat. "Dengan segala keterbatasan kita terus berupaya. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan selama ini membuat *call center*. Pos pengaduan. Melalui *call center* ini dan FKPM yang ada benar-benar membantu kami di lapangan."

Munculnya berbagai kebijakan, dari TAP MPR sampai Surat Keputusan Kapolri, dari sosialisasi hingga pelatihan, dari membangun pos pengaduan hingga menjadi guru TK, merupakan upaya keras mewujudkan polisi yang demokratis, dan dekat dengan rakyatnya.



foto: www.isi.com

Namun apalah artinya sebuah upaya jika semua komponen bangsa ini tak mampu bersinergi. Sebagai sebuah upaya perubahan, baik secara strategi maupun filosofis, sudah seharusnya kita meyakini

Polmas sebagai pintu utama mewujudkan polisi yang benar-benar milik rakyat. Karena dengan Polmaslah, polisi dan rakyat benar-benar menjadi mitra sejajar. Bahu-membahu mengatasi

berbagai persoalan, tidak hanya soal kriminalitas tetapi juga problem sosial lainnya. Bagi Polri ini tugas tak ringan dan amanah yang mesti diemban, bagi rakyat ini adalah harapan. (a5,ET)

Apa Kata Mereka Tentang Polmas?

Akbarudin Sucipto

Ketua RT 02 Mandalangan Cirebon



“Polisi Harus Tegas Say No to Calo”

Menurut saya, kinerja polisi masih butuh waktu dan proses panjang. Apalagi polisi sendiri punya pencitraan minor di masyarakat. Butuh waktu untuk mempertemukan itu. Sekarang yang jadi persoalan, soal relasi dengan polisi, masyarakat sudah terlanjur punya pandangan “masa sumur marani timbah?” Kenyataannya memang seperti itu, sekarang ada pergeseran, yang butuh siapa?. Sepertihalnya masalah sosialisasi, padahal dari polisi sudah ada unit-unitnya. Realitasnya, kalau tidak ada laporan, tidak ada tindakan dan tidak ada kerja.

Sebetulnya, semua anggota polisi itu, harus menjiwai apa itu Polmas. Kalau orangnya, ada yang bertugas sebagai petugas Polmas atau Babinkamtibmas, kemudian FKPM, bukan unit organisasi semata-mata. Di sini kita bisa menggunakan pranata sosial yang ada. Malah sekarang kecenderungannya menjadi anggota FKPM merasa lebih polisi dari pada polisinya. Ini yang salah kaprah. Jadi, pada dasarnya masyarakat itu butuh polisi, karena masyarakat butuh ketertaman. []

Amin Syaiful

Aktivis LSM Banati

“Polisi Harus Berani Ubah Kultur”

Polisi sebaiknya cepat-cepat koreksi diri. Dan yang terpenting mau merubah kultur dari kultur militer ke sipil. Caranya dengan pendekatan preventif, selain itu juga mengetahui kebiasaan dan kesenangan masyarakat. []

Masripah Salya

Aktivis forum keluarga buruh migrant Indonesia (FKBMI)



“Polisi Harus Ubah Citra Ujung-Ujungnya Duit”

Selama ini jika berurusan dengan polisi, anggapan UUD (ujung-ujungnya duit- red) itu masih lekat. Seakan-akan persoalan itu bisa terselesaikan hanya dengan uang. Itu yang harus dikurangi. Dengan anggapan seperti itu akibatnya masyarakat yang ingin minta bantuan pada polisi, selalu merasa takut.

Kami berharap, dengan gerakan Polmas, berbagai persoalan masyarakat terminimalisir. Apalagi dalam hal penanganan TKI/TKW yang bermasalah. Paling tidak dengan campur tangan polisi, para calo nakal dapat ditindak dengan tegas, agar lebih berhati-hati dalam mengirim orang ke luar negeri. []